



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



RABU LEGI

24 APRIL 2024 (14 SAWAL 1957 / TAHUN LXXIX NO 196)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Merespons Pertimbangan MK UU Pemilu Harus Direvisi

Revisi UU Pemilu :

Pertama, menyangkut aturan teknis yang menegaskan ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik, durasi waktu atau jumlah harinya harus jelas dan jadwal cuti wajib dilaporkan ke KPU dan Bawaslu secara resmi.

Kedua, sanksi yang berat atas pelanggaran tersebut harus jelas, terukur dan nyata. Sanksi menjadi kewenangan Bawaslu dan wajib dipatuhi pejabat yang bersangkutan jika terbukti melanggar.

Ketiga, pembagian bantuan sosial (bansos), beasiswa, sertifikat tanah, pembagian uang dan peresmian-peresmian sarana/prasarana yang berdampak pada masyarakat harus diatur ulang waktunya agar tidak tumpang tindih pada masa-masa kampanye.



Sumber: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin
Grafis JOS

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) harus dilakukan revisi setidaknya mencakup tiga hal. Yanuar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/4), merespons pertim-

banggan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Senin (22/4), yang menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, sehingga menimbulkan kebuntuan dalam upaya penindakan ter-

hadap pelanggaran pemilu.

Ketiga hal yang dinilai perlu direvisi, pertama, menyangkut aturan teknis yang menegaskan ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik, durasi waktu atau jumlah harinya harus jelas dan jadwal cuti wajib dilaporkan ke KPU dan Bawaslu secara resmi.

Ia menilai, sorotan MK agar perjalanan dinas pejabat negara diatur ulang supaya tidak berhimpitan dengan jadwal kampanye itu layak ditindaklanjuti. "Saya kira sangat penting untuk mengatur ulang kampanye para pejabat negara setingkat presiden/wakil presiden dan menteri. Selama ini, mereka sadar atau tidak sadar sering kali menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat untuk kepentingan elektoral," katanya.

Kedua, sanksi yang berat atas pelanggaran tersebut harus jelas, terukur dan nyata. Sanksi menjadi kewenangan Bawaslu dan *** Bersambung hal 7 kol 1**



Penyampaian pernyataan pers Constitutional Law Society, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (CLS FH UGM) menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi bertajuk 'Pasca Putusan MK, Kita Harus Apa?' di Kampus FH UGM, Selasa (23/4/2024).

SIKAPI PASCAPUTUSAN MK

Bangkitkan Gagasan Pembatasan Kekuasaan

YOGYA (KR) - Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (CLS FH UGM) memberikan pernyataan pers menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bertajuk 'Pasca-Putusan MK, Kita Harus Apa?' di kampus FH UGM, Selasa (23/4). Melalui pernyataan pers ini CLS FH UGM ingin membangkitkan gagasan pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden RI.

Menurut Presiden Constitutional Law Society FH UGM, Ignasius Lintang Nusantara, MK telah memutus-

kan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres. Tetapi, pihaknya, kecewa sebab masih ada harga yang harus dibayar dari putusan itu, yaitu nasib kekuasaan di tangan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kami berpandangan, putusan Majelis Hakim MK dalam memutuskan perkara sengketa PHPU tersebut tidak akan mengubah keadaan secara signifikan. Sebab, hal besar yang patut kita pertanyakan adalah kita harus apa? Setelah putusan tersebut," kata Lintang.

Dalam acara tersebut juga disampaikan pernyataan pengantar oleh Dr Zainal Arifin Mochtar SH LLM dan Dr R Herlambang P Wiratraman SH MA (Dosen Departemen Hukum Tata Negara FH UGM). Acara dihadiri segenap sivitas akademika FH UGM.

Dikatakan Lintang, momentum pascaputusan ini adalah waktu yang tepat untuk bersama-sama mengarahkan pandangan pada sebuah gagasan dan cara untuk melakukan pembatasan pada kekuasaan

*** Bersambung hal 7 kol 5**



Analisis Risiko Bisnis Meningkat

Ahmad Ma'ruf, SE MSi

DEPRESIASI rupiah terhadap dolar AS pada sepekan terakhir ini sudah menembus Rp 16.200. Terseoknya uang Garuda ini tidak dapat dianggap enteng. Seiring dengan geopolitik internasional, khususnya konflik Timur Tengah yang semakin memanas, maka dari sisi bisnis dan ekonomi nasional, kondisi ini mendorong kenaikan risiko bisnis bagi produsen dan masyarakat luas sebagai konsumen.

Sisi lain, kondisi politik dalam negeri sedang meradang juga seiring ketok palu Mahkamah Konstitusi atas gugatan pemilihan presiden yang menolak gugatan kubu 01 dan 02. Distabilitas politik berpotensi menghambat konsolidasi ekonomi sektor riil maupun moneter seiring merosotnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini diperberat dengan praktik pemindahan investasi para investor asing. Aliran modal keluar tidak dapat dibendung, meski dalam jangka pendek, terlebih kebijakan suku bunga acuan masih tidak berubah.

Cadangan devisa dalam dua bulan terakhir juga menurun meskipun nilainya masih cukup banyak untuk skala ekonomi Indonesia. Tercatat pada akhir Maret 2024 sebanyak 140,4 miliar dolar AS, menurun 4 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya. Menahan tren depresiasi rupiah merupakan keharusan.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

| JADWAL SALAT | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | Subuh |
|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:46 | 04:24 |

Rabu, 24 April 2024
Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

MENKO POLHUKAM: Digodok, Pembentukan Satgas Berantas Judi Online

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama beberapa pejabat kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (23/4).

Rapat itu merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas minggu lalu (18 April), diikuti Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Jaksa Agung Sanitair Burhanuddin, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen DK Wahyu Widada, dan Ketua Dewan Komisiner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

"Ini kami sudah buat drafnya, kemudian akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk segera kami lakukan,"

*** Bersambung hal 7 kol 5**

PRABOWO-GIBRAN BAKAL HADIR DI KPU Hari Ini Penetapan Pemenang Pilpres

JAKARTA (KR) - Pasangan Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendampingi langsung acara penetapan pemenang Pilpres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (24/4) hari ini.

"Pak Prabowo akan datang langsung, karena diundang KPU untuk menerima keputusan resmi terkait dengan penetapan sebagai presiden terpilih," kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di kediaman Prabowo di kawasan Kartanegara IV Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dalam acara tersebut, Dahnil memastikan Prabowo akan memberikan tanggapannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Namun,



Pedagang menata foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Kawasan Pasar Baru, Jakarta, Selasa (23/4/2024).

sebelum menyampaikan pernyataan resmi, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu, terlebih dulu berdiskusi dengan tim hukumnya, Selasa (23/4).

Seperti diketahui, MK Senin (22/4) membatalkan putusan dua perkara sengketa Pilpres 2024. Dua perkara PHPU Pilpres

2024 diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Dalam amar putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Menurut MK, permohonan kedua kubu tersebut tidak berdasar menurut hukum untuk seluruhnya.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

AKAN DIOPERASIKAN LAGI Kejagung Hitung Nilai Smelter Sitaan

PANGKALPINANG (KR) - Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera menghitung nilai lima smelter timah yang disita penyidik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai aset lima smelter ini kemungkinan mencapai triliunan rupiah dan jika tidak dikelola, nilainya turun menjadi miliaran rupiah. Oleh karena itu, aset-aset sitaan ini akan dioperasikan.

"Nilai aset ini belum dihitung, karena baru kemarin disita," kata Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung RI Amir Yanto usai rapat tertutup membahas pengelolaan lima smelter sitaan di Pangkalpinang, Selasa (23/4).

Menurutnya, penyitaan aset di lima unit smelter Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terkait kasus korupsi tata kelola timah, dimana Kejagung telah menetapkan 15 orang tersangka. Penyitaan aset smelter ini di bawah kewenangan sementara penyidik. Jika aset ini tidak kelola pasti akan rusak dan menurunkan nilai aset sitaan tersebut.

"Ini masih dalam proses hukum dan apabila putusan pengadilan nanti aset ini dikembalikan kepada pemilik, maka akan dikembalikan. Namun jika putusan pengadilan nanti dirampas negara, akan dirampas dengan memperhitungkan denda serta uang pengganti," kata Amir.

Rapat koordinasi lintas bidang terkait tindak lanjut penyitaan lima smelter timah itu dihadiri Deputi Hukum Kementerian BUMN, Dirut PT Timah Tbk, BPKP, Direktur Investigasi Mabes Polri. Selain itu, rakor tertutup terkait penyitaan smelter ini juga dihadiri

*** Bersambung hal 7 kol 5**

KEJATI DIY DUGA ADA KORUPSI RP 18 M

Kasus Taru Martani Naik ke Penyidikan

YOGYA (KR) - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY telah menaikkan status kasus dugaan korupsi PT Taru Martani senilai Rp 18 miliar lebih ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan ini, tim akan segera memanggil beberapa saksi untuk menentukan tersangka dalam kasus PT Taru Martani.

Aspidsus Kejati DIY Muhammad Anshar Wahyuddin SH MH mengungkapkan, Tim Penyidik Kejati telah melakukan penyelidikan sejak satu bulan yang lalu. Setelah memanggil lebih dari 5 orang untuk dimintai keterangan, tim berhasil menemukan dua alat bukti dugaan korupsi di BUMD DIY yang berge-

rak di bidang cerutu ini.

Selanjutnya Tim Penyidik Kejati DIY menaikkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan mulai Senin (22/4). "Kami sudah menemukan minimal dua alat bukti dugaan korupsi. Kemudian mulai ke marlin, sudah kami naikkan ke tahap penyidikan," ungkap Anshar, Selasa (23/4).

Dalam tahap penyidikan ini, tim akan segera memanggil beberapa orang saksi baik dari internal PT Taru Martani maupun pihak-pihak terkait. Hal itu dilakukan untuk menentukan tersangka dalam kasus korupsi di PT Taru Martani. "Saksi-saksi yang akan kami panggil itu untuk



KR-Saifullah Nur Ichwan
Muhammad Anshar Wahyuddin

mencari siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Setelah itu tim akan menetapkan tersangka," terangnya.

Disinggung tentang

kronologi kasusnya, mantan Kajari Boyolali ini masih enggan menjelaskan. "Kami belum bisa menjelaskan secara detail. Tunggu saja, nanti akan kami sampaikan kalau sudah jelas semua," kilahnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber, pada tahun 2022-2023, ada kas PT Taru Martani yang diinvestasikan ke komedi-tas berjangka sekitar senilai Rp 18 miliar lebih. Investasi itu di atasnamakan pribadi, karena tidak bisa di atasnamakan perusahaan. Investasi itu tidak pernah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rencana kerja dan anggaran perusahaan

(RKAP) 2022 maupun 2023. (Sni)-d



● RABU 10 April 2024, saya ikut salat Idul Fitri di Lapangan Minggiran Kecamatan Mantrijeron. Selesai salat, panitia mengumumkan ada jemaah yang kehilangan seorang anak laki-laki umur 10 tahun. Juga telah ditemukan satu cincin emas, satu kunci kendaraan bermotor, bagian bawah mukena warna hitam, dan kacamata. (Wahyu Widiasih, Gedongkiwo Mantrijeron, Yogyakarta)-d